Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2023

Raicha Nabila Nada^{1*}, Ujang Syahrul Mubarak², and Taufik Akbar³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

Abstrak

This study aims to evaluate the financial performance of the Regional Government of Tulungagung Regency during the 2021–2023 period using four financial ratios: regional financial independence ratio, the effectiveness ratio of locally-generated revenue (PAD), activity ratio, and growth ratio. Data were obtained from the Regional Budget Realization Report and analyzed using a descriptive quantitative method. The results show that Tulungagung Regency has performed well in terms of revenue, with actual income exceeding the budget target. However, expenditure realization remains below the allocated budget, indicating issues in planning and budget execution. The local government still heavily relies on central government transfers, thus financial independence has not been fully achieved. The findings of this research are expected to serve as a basis for evaluating and improving regional financial management.

Keywords: Financial Performance, Local Government, Financial Ratio

Copyright (c) 2025 Raicha Nabila Nada¹

✉Corresponding author :

Email Address : raichanabilan@gmail.com

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri guna menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Salah satu instrumen evaluatif yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran yang dianalisis melalui berbagai rasio keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio aktivitas belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan. Analisis ini dapat menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber pendapatan dan melakukan pengeluaran belanja secara efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan. Seperti, serapan anggaran belanja yang rendah terjadi akibat berbagai faktor, seperti proyek infrastruktur yang gagal lelang, perencanaan yang kurang matang dari organisasi perangkat daerah, serta gangguan pelaksanaan proyek akibat musim hujan.

Kinerja pendapatan daerah kabupaten Tulungagung pada periode 2021-2023 menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari realisasi pendapatan daerah yang selalu melampaui target anggaran yang telah ditetapkan, seperti yang bisa dilihat pada table berikut

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung

No	Tahun	Pendapatan Daerah	
		Anggaran	Realisasi
1	2021	Rp 2.615.259.162.182,00	Rp 3.095.975.320.366,44
2	2022	Rp 2.582.895.616.333,00	Rp 2.642.478.582.447,22
3	2023	Rp 2.652.174.455.959,00	Rp 2.842.992.133.179,36

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

Meskipun demikian, realisasi belanja daerah justru tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan pada table berikut

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung

No	Tahun	Belanja Daerah	
		Anggaran	Realisasi
1	2021	Rp 2.666.875.309.235,00	Rp 2.369.544.781.636,47
2	2022	Rp 2.909.885.891.557,00	Rp 2.495.191.263.569,23
3	2023	Rp 2.680.969.210.387,00	Rp 2.500.892.895.012,19

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung yang telah dijelaskan dalam table 1. dan 2, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 hingga 2023 selalu melampaui target anggaran. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan realisasi belanja daerah yang justru berada di bawah target anggaran yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara pendapatan dan belanja ini berdampak pada pelaksanaan program pembangunan daerah yang kurang optimal. Selain itu, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga masih cukup tinggi, sehingga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan pada periode 2021–2023. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen Keuangan

Menurut Sutrisno (dalam Suhardi, 2018:241), manajemen keuangan adalah seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana. Dalam konteks pemerintahan daerah, manajemen keuangan bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa keuangan daerah mencakup keseluruhan hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan uang, termasuk semua bentuk kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sari et al., (2021:410), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran sistem pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama periode tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, APBD adalah dasar dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Semua pendapatan maupun penerimaan yang menjadi hak daerah, serta semua pengeluaran yang sudah menjadi kewajiban daerah, harus dicantumkan dalam APBD.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (dalam Zuhri, M., & Soleh, 2016), rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintah, pelayanan, dan pembangunan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer pusat:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

No	Kriteria	Persentase	Pola Hubungan
1	Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
2	Rendah	25% - 50%	Konsultatif
3	Sedang	50% - 75%	Partisipatif
4	Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim (dalam Zuhri, M., & Soleh, 2016)

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efektif pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD. Nilai minimal 100% menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

No	Kriteria	Persentase
1	Sangat Efektif	>100%
2	Efektif	100%
3	Cukup Efektif	90% - 99%
4	Kurang Efektif	75% - 89%
5	Tidak Efektif	<75%

Sumber : Halim (dalam Zuhri, M., & Soleh, 2016)

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini menunjukkan proporsi anggaran daerah yang digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin, sedangkan belanja modal untuk pembiayaan aset dan infrastruktur.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

No	Kriteria	Persentase
1	Tidak Baik	0% - 50%
2	Baik	50% - 100%

Sumber : Halim (dalam Zuhri, M., & Soleh, 2016)

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan dan mengembangkan kapasitas keuangan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{RpXn} - 1}{\text{RpXn} - 1} \times 100\%$$

No	Kriteria	Persentase
1	Rendah	0% - 25%
2	Sedang	25% - 50%
3	Tinggi	50% - 100%

Sumber : Halim (dalam Zuhri, M., & Soleh, 2016)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan analisis rasio keuangan daerah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Periode yang dianalisis adalah tahun anggaran 2021 hingga 2023 dengan data yang diakses selama Januari hingga Maret 2025.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan di publikasikan oleh organisasi atau perusahaan. Pada penelitian ini data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2023 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung dan situs resmi pemerintah daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan pemerintah daerah, khususnya data realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung empat rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpXn - RpXn - 1}{RpXn - 1} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan setiap rasio keuangan tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu seperti yang telah dijelaskan pada tabel 3, 4, 5, dan 6. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung selama periode 2021–2023, dilakukan dengan menggunakan empat rasio utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 7. Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Keterangan
2021	Rp953.892.026.423,44	Rp2.051.224.047.043,00	47%	Rendah/ Konsultatif
2022	Rp577.544.166.624,22	Rp2.064.526.415.823,00	28%	Rendah/ Konsultatif
2023	Rp719.585.859.367,36	Rp2.123.406.273.812,00	34%	Rendah/ Konsultatif

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 7, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama periode 2021–2023 masih berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Pada tahun 2021 rasio sebesar 47%, tahun 2022 turun menjadi 28%, dan tahun 2023 naik menjadi 34%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Penurunan tajam pada tahun 2022 disebabkan oleh turunnya PAD dari Rp953.892.026.423,44 (2021) menjadi Rp577.544.166.624,22. Meskipun tahun 2023 PAD meningkat menjadi Rp719.585.859.367,36, peningkatan tersebut belum cukup untuk menurunkan ketergantungan terhadap dana transfer. Ketergantungan ini berisiko menghambat kemandirian daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan PAD secara kreatif dan maksimal.

2. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 8. Hasil Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD (%)	Keterangan
2021	Rp953.892.026.423,44	Rp578.186.643.535,00	165%	Sangat Efektif
2022	Rp577.544.166.624,22	Rp539.727.793.348,00	107%	Sangat Efektif
2023	Rp719.585.859.367,36	Rp580.343.582.411,00	124%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 8 menunjukkan bahwa efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berada dalam kategori sangat efektif. Tahun 2021 sebesar 165%, tahun 2022 sebesar 107%, dan tahun 2023 sebesar 124%. Selama tiga tahun berturut-turut, rasio efektivitas PAD selalu di atas 100%, artinya realisasi PAD melebihi target anggaran.

Fluktuasi nilai rasio disebabkan oleh penurunan realisasi PAD pada tahun 2022, namun kembali meningkat di tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan penerimaan daerah, seperti peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

3. Rasio Aktivitas

Tabel 9. Hasil Analisis Rasio Belanja Operasi

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)	Keterangan
2021	Rp2.064.101.812.477,69	Rp2.369.544.781.636,47	87%	Baik
2022	Rp2.141.914.216.517,25	Rp2.495.191.263.569,23	86%	Baik
2023	Rp2.244.987.468.837,54	Rp2.500.892.895.012,19	90%	Baik

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 10. Hasil Analisis Rasio Belanja Modal

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)	Keterangan
2021	Rp288.291.855.548,78	Rp2.369.544.781.636,47	12%	Tidak Baik
2022	Rp352.048.362.950,98	Rp2.495.191.263.569,23	14%	Tidak Baik
2023	Rp254.914.441.674,65	Rp2.500.892.895.012,19	10%	Tidak Baik

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 9 dan 10, rasio belanja operasi Kabupaten Tulungagung menunjukkan angka yang tinggi yaitu 87% (2021), 86% (2022), dan 90% (2023). Artinya sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk keperluan rutin operasional. Sebaliknya, rasio belanja modal masih rendah yaitu 12% (2021), 14% (2022), dan 10% (2023). Hal ini mengindikasikan bahwa porsi anggaran yang digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur masih minim.

Ketimpangan antara belanja operasi dan belanja modal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih berfokus pada pembiayaan kegiatan rutin. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ke depan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung perlu memprioritaskan belanja modal agar pembangunan daerah lebih cepat dan merata.

4. Rasio Pertumbuhan

Tabel 11. Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Tahun Sekarang	Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya	Rasio Pertumbuhan (%)	Keterangan
2021	Rp3.095.975.320.366,44	Rp2.598.322.054.180,68	19%	Rendah
2022	Rp2.642.478.582.447,22	Rp3.095.975.320.366,44	-15%	Rendah
2023	Rp2.842.992.133.179,36	Rp2.642.478.582.447,22	8%	Rendah

Sumber: Data diolah penulis

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi. Tahun 2021 tumbuh 19%, namun tahun 2022 mengalami penurunan menjadi -15%. Pada tahun 2023, rasio kembali tumbuh sebesar 8%.

Penurunan tajam di tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya pendapatan daerah, sedangkan kenaikan pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan meskipun belum signifikan. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai kategori pertumbuhan yang tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung selama periode 2021–2023 dengan menggunakan empat rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, aktivitas belanja, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan masih tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif, yang mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif karena realisasi pendapatan selalu melebihi target, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022.

Rasio aktivitas menunjukkan dominasi pada belanja operasional yang cukup besar dibandingkan dengan belanja modal, yang mengindikasikan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan rutin daripada untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. Sementara itu, rasio pertumbuhan PAD mengalami fluktuasi cukup tajam dengan penurunan pada 2022 dan sedikit pemulihan pada 2023, namun secara keseluruhan masih tergolong rendah. Hasil dalam penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah masih menjadi tantangan, sehingga dibutuhkan strategi peningkatan PAD yang lebih inovatif serta pengelolaan anggaran yang lebih berorientasi pada belanja produktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan dan pembagian belanja yang tidak seimbang bisa memengaruhi kemandirian dan rencana pembangunan daerah. Hasil ini juga mendukung pandangan bahwa agar keuangan daerah bisa berjalan baik dan terus berkembang, pendapatan perlu ditingkatkan secara seimbang dan anggaran harus dikelola dengan benar. Selain itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan yang baik dan pengalihan penggunaan anggaran dari belanja rutin ke belanja pembangunan agar bisa mendorong pertumbuhan daerah.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, kurang lengkap atau tidak tersedianya data sehingga beberapa rasio keuangan tidak dapat digunakan seperti rasio efisiensi PAD, dan penelitian ini juga tidak melakukan perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya sehingga tidak

mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait bagaimana pengelolaan keuangan antar daerah untuk mencapai efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu mengelola anggaran dengan lebih efektif agar pengeluaran dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan layanan public. PAD juga harus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang, misalnya dengan mengelola pajak, retribusi, dan aset daerah secara lebih baik. Penting juga menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, serta meningkatkan keterbukaan dan kejujuran dalam laporan keuangan. Evaluasi keuangan secara rutin juga perlu dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melengkapi data yang kurang, misalnya melalui wawancara atau sumber tambahan dari instansi terkait agar semua rasio dapat digunakan. Selain itu, peneliti juga bisa memilih objek penelitian berupa kabupaten/kota lain dengan data yang lebih lengkap dan membandingkan hasilnya dengan daerah lain agar hasil yang di dapat lebih menyeluruh.

Referensi :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 19. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143371/permendagri-no-19-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 58. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. Prosiding Seminar Nasional and Call for Paper STIE AAS, 408-425.
- Suhardi. (2018). Pengantar Manajemen dan Aplikasinya (M. Si. Prof. Dr. Anis Eliyana, S.E., Ed.). Penerbit Gava Media Anggota Ikapi Diy.
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ecotechnopreneur: Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>